

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Lukman Hakim¹, Imam Nazarudin Latif², Umi Kulsum³
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : lukmanahoya39@gmail.com

Keywords :

*Financial Performance,
Budget Realization Report,
Financial Ratio Analysis*

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the financial performance of the West Kutai Regency Budget Realization Report for 2020-2021, The analytical tools used in this study are the independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, spending compatibility ratio and spending growth ratio which will be analyzed in the 2020-2021 West Kutai Regency Budget Realization Report.

The analytical tools used in this study are the independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, spending compatibility ratio and spending growth ratio which will be analyzed in the 2020-2021 West Kutai Regency Budget Realization Report.

The results of the financial ratio analysis that financial performance is based on the Budget Realization Report of West Kutai Regency in 2020-2021, in terms of the independence ratio is classified as instructive or the role of the central government is more dominant than the independence of the regional government with a ratio of 7.23% (2020) and 7.94% (2021), in terms of the ratio efficiency is classified as very effective with a ratio of 110.72% (2020) and 124.94% (2021), in terms of the efficiency ratio is classified as efficient with a ratio of 70.13% (2020) and 73.29% (2021), in terms of the compatibility ratio of expenditures based on operating expenditures, it is classified as quite balanced with an average ratio of 59.13% and in terms of the compatibility ratio of expenditures based on capital expenditures, it is classified as unbalanced with an average ratio of 24.94%, and in terms of the expenditure growth ratio is classified as positive with a ratio of 0.27% (2020) and 4.24% (2021).

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Laporan realisasi anggaran sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan anggarannya.

Meningkatkan suatu kinerja keuangan pemerintah daerah diperlukan analisis rasio keuangan, hal bertujuan untuk menganalisis apakah pemerintah daerah mampu mengelola keuangan daerahnya dengan baik dan benar dengan aturan-aturan yang berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap laporan realisasi anggaran

merupakan salah satu parameter dalam pengukuran kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya. Analisis rasio kinerja keuangan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kesesrasian belanja, dan rasio pertumbuhan belanja.

Akuntansi sektor publik menurut Indra Bastian (2014:6): “Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat”.

Kinerja keuangan menurut Rudianto (2013:189): “Hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelolah aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan”.

Laporan Realisasi Anggaran menurut Ratmono & Sholihin (2017:25): “Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan laporan mengenai perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasi dalam satu tahun anggaran. Laporan Relisasi Anggaran (LRA) terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya”.

Rasio keuangan menurut Kasmir (2014:104): “Kegiatan membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antara komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode”.

Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini terletak di Sendawar. Kabupaten Kutai Barat merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Kutai yang telah ditetapkan berdasarkan UU Nomor 47 Tahun 1999. Kabupaten Kutai Barat berbatasan dengan Kabupaten Mahakam Ulu di sebelah utara, Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah timur, Kabupaten Penajam Paser Utara di sebelah selatan dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Kabupaten Kutai Barat terbagi menjadi 16 kecamatan dan 190 kampung dengan luas wilayah 20.382,60 km² dan memiliki jumlah penduduk sekitar 168.348 jiwa tahun 2021. Mengelola suatu keuangan diperlukan suatu badan untuk mengelola keuangan, yakni Badan Keuangan Dan Aset Daerah pada Kabupaten Kutai Barat bertugas sebagai penyelenggara keuangan daerah dan pelaksana kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat untuk menangani urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, menyelenggarakan koordinasi, melayani masyarakat, pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Laporan realisasi anggaran sebagai alat ukur untuk menilai kinerja keuangan. Laporan realisasi anggaran merupakan aktivitas pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan. Berdasarkan data awal yang diperoleh bersumber dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kutai Barat bahwa pendapatan daerah menunjukkan penurunan dalam dua periode anggaran.

Tabel 1: Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Barat

Uraian	Tahun		Persentase
	Anggaran 2020	Realisasi 2020	
Pendapatan LRA	Rp2.394.215.427.872,37	Rp2.219.431.739.046,89	92,70%
Belanja Daerah	Rp2.952.158.966.939,00	Rp1.764.309.293.317,00	66,27%
Uraian	Tahun		Persentase
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	
Pendapatan LRA	Rp2.247.965.483.906,00	Rp1.973.323.752.485,71	87,78%
Belanja Daerah	Rp2.944.928.475.970,00	Rp2.158.396.440.333,79	73,29%

Sumber: BKAD Kabupaten Kutai Barat, 2022

Berdasarkan Tabel di atas, bahwa Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat menunjukkan selama kurun waktu dua tahun bahwa pendapatan daerah menurun dan belanja daerah meningkat.

Hal ini disebabkan karena serapan anggaran yang cukup rendah dan belum optimal karena kebutuhan masyarakat yang meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada perkembangan PAD. Anggaran belanja publik harus lebih besar realisasinya dibandingkan belanja aparatur daerah. Untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Barat, sangat penting terhadap penggunaan anggaran sebagai tolak ukur kinerja keuangan dari pertumbuhan pendapatan dan belanja tiap tahunnya. Akan tetapi hal ini belum dapat menjelaskan apakah menurunnya kinerja keuangan tersebut bersifat negatif dan kinerja keuangan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik atau sebaliknya. Untuk itu kinerja keuangan akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja, dan rasio pertumbuhan belanja sehingga dapat mengetahui kinerja keuangan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul "**Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat**".

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang menggambarkan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah, yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten kutai barat diperlukan laporan realisasi anggaran yang mengenai pemakaian sumber daya keuanganyang sedang dikelola Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Sehingga untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten kutai barat terhadap laporan realisasi anggaran, menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja dan rasio pertumbuhan belanja.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah:

1) Penelitian Lapangan (*Field work research*)

Pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung ke lapangan seperti wawancara (*interview*) teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak staf Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk mendapatkan data primer.

2) Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020-2021.

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu dengan langkah mengumpulkan adanya menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan menyaring dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menurut Mahmudi (2016:140): “Keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya”. Berikut rumus perhitungan rasio kemandirian sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pemerintah pusat dan daerah serta Pinjaman Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Halim dalam Kusuma (2014:189), kriteria pengukuran rasio kemandirian dalam kemampuan keuangan terbagi menjadi beberapa kriteria sebagai berikut:

Tabel 2: Standar Pengukuran Kriteria Rasio Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Kriteria Rasio	Pola Hubungan
Sangat rendah	0-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Degelatif

Sumber: Data Diolah, 2022

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menurut Mahmudi (2019:86): “Hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil)”. Berikut rumus perhitungan rasio efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, Kriteria tingkat efektivitas sebagai berikut:

Tabel 3: Standar Pengukuran Kriteria Rasio Efektivitas

Keterangan	Kriteria Rasio
Lebih Efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	<60%

Sumber: Data Diolah, 2022

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menurut Mahmudi (2019: 85): “Organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya”. Berikut rumus perhitungan rasio efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, Kriteria tingkat efisiensi sebagai berikut:

Tabel 4: Kriteria Rasio Efisiensi

Keterangan	Kriteria Rasio
Tidak Efisien	>100%
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efisien	<60%

Sumber: Data Diolah, 2022

4. Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian menurut Mahmudi (2016:160): “Rasio yang mengukur keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilitas. Agar fungsi anggaran sebagai tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja.” Dalam mengukur keseimbangan antara belanja terdapat dua analisis rasio keserasian belanja yaitu analisis keserasian belanja terhadap belanja operasi dan analisis keserasian belanja terhadap belanja modal.

a. Analisis rasio belanja operasi

Rasio belanja operasi menurut Mahmudi (2016:160): “Membandingkan jumlah keseluruhan yang ada dalam belanja operasi dengan jumlah keseluruhan yang ada dalam belanja daerah. Analisis tersebut memberikan informasi bagi para pengguna laporan terkait besaran belanja daerah yang ditujukan untuk belanja operasi”. Berikut rumus perhitungan rasio belanja operasi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Analisis rasio belanja modal

Rasio belanja modal menurut Mahmudi (2016:160): “Perbandingan antara jumlah keseluruhan yang ada dalam belanja modal dengan jumlah keseluruhan yang ada dalam belanja daerah. Dari analisis ini, pengguna laporan bisa memperoleh informasi mengenai besaran jumlah belanja daerah yang ditujukan terhadap investasi yang berbentuk belanja berupa modal pada anggaran yang bersangkutan”. Berikut rumus perhitungan rasio belanja modal sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2016:162) untuk menilai keserasian belanja tersebut, kriteria pengukuran rasio keserasian belanja terbagi menjadi beberapa kriteria sebagai berikut:

Tabel 5: Standar Pengukuran Kriteria Rasio Keserasian Belanja

Keterangan	Kriteria Rasio
Tidak Berimbang	0 - 20%
Kurang Berimbang	20% - 40%
Cukup Berimbang	40% - 60%
Berimbang	60% - 80%
Sangat Berimbang	80% - 100%

Sumber: Data Diolah, 2022

5. Rasio Perumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja menurut Mahmudi (2016:158): “Analisis yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhna masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggung jawabkan”. Berikut rumus perhitungan rasio pertumbuhan belanja sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi BelanjaThn } t - \text{Realisasi Belanja } t_1}{\text{Realisasi Belanja Thn}_1} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2016:160) untuk menilai pertumbuhan belanja, kriteria pengukuran rasio pertumbuhan belanja terbagi menjadi beberapa kriteria sebagai berikut:

Tabel 6: Standar Pengukuran Kriteria Rasio Pertumbuhan Belanja

Keterangan	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

Sumber: Data Diolah, 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten kutai barat berdasarkan pada laporan realisasi anggaran, maka hasil yang diperoleh dalam analisis rasio keuangan pemerintah daerah kabupaten kutai barat adalah sebagai berikut:

1. Analisis Rasio Kemandirian

Tabel 7: Hasil analisis rasio kemandirian

Keterangan	Tahun Anggaran	
	2020	2021
PAD	Rp147.337.429.067,13	Rp142.436.235.876,13
Pendapatan Transfer Pusat	Rp1.812.028.197.947,00	Rp1.524.023.693.236,00
Pendapatan Transfer Daerah	Rp223.954.578.370,00	Rp269.055.907.100,00
Pinjaman Daerah	Rp1.277.337.094,37	Rp549.113.949,98
Rasio	7,23%	7,94%
Hasil	Instruktif	Instruktif

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel diatas menunjukkan kinerja keuangan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2020 dan 2021 ditinjau dari analisis rasio kemandirian menunjukkan bahwa sangat rendah kemampuan keuangannya pada tahun 2020 dengan presentase rasio sebesar 7,23% dan pada tahun 2021 presentasi rasio sebesar 7,94%.

2. Analisis Rasio Efektivitas

Tabel 8: Hasil analisis rasio efektivitas

Keterangan	Tahun Anggaran	
	2020	2021
Realisasi Penerimaan PAD	Rp147.337.429.067,13	Rp142.436.235.876,13
Target Penerimaan PAD	Rp133.060.705.939,54	Rp113.995.599.666,00
Rasio	110,72%	124,94%
Hasil	Sangat Efektif	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel diatas menunjukkan kinerja keuangan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2020 dan 2021 ditinjau dari analisis rasio efektivitas menunjukkan bahwa meningkatnya penerimaan PAD pada tahun 2020 dengan presentase rasio sebesar 110,72% dan pada tahun 2021 dengan presentasi rasio sebesar 124,94%.

3. Analisis Rasio Efisiensi

Tabel 9: Hasil analisis rasio efisiensi

Keterangan	Tahun Anggaran	
	2020	2021
Realisasi Belanja Daerah	Rp2.070.537.134.542,82	Rp2.158.396.440.333,79
Anggaran Belanja Daerah	Rp2.952.158.966.939,00	Rp2.944.928.475.970,00
Rasio	70,13%	73,29%
Hasil	Efisien	Efisien

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel diatas menunjukkan kinerja keuangan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai

Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2020 dan 2021 ditinjau dari analisis rasio efisiensi menunjukkan bahwa meningkatnya belanja daerah pada tahun 2020 dengan presentase rasio sebesar 70,13% dan pada tahun 2021 dengan presentasi rasio sebesar 73,29%.

4. Analisis Rasio Keserasain Belanja

a. Berdasarkan hasil analisis rasio belanja operasi, sebagai berikut:

Tabel 10: Hasil Analisis Rasio Belanja Operasi

Keterangan	Tahun Anggaran	
	2020	2021
Belanja Operasi	Rp1.250.120.188.171,71	Rp1.249.691.261.990,73
Total Belanja Daerah	Rp2.070.537.134.542,82	Rp2.158.396.440.333,79
Rasio	60,37%	57,89%

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel diatas menunjukkan kinerja keuangan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2020 dan 2021 ditinjau dari analisis rasio keserasian belanja pada belanja operasi menunjukkan cukup berimbang pada tahun 2020 dengan presentase rasio sebesar 60,37% dan pada tahun 2021 dengan presentasi rasio sebesar 57,89% dengan rata- rata belanja operasi sebesar 59,13%.

b. Berdasarkan hasil analisis rasio belanja modal, sebagai berikut:

Tabel 11: Hasil Analisis Rasio Belanja Modal

Keterangan	Tahun Anggaran	
	2020	2021
Belanja Modal	Rp460.541.741.529,11	Rp597.002.939.452,86
Total Belanja Daerah	Rp2.070.537.134.542,82	Rp2.158.396.440.333,79
Rasio	22,24%	27,65%

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel diatas menunjukkan kinerja keuangan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2020 dan 2021 ditinjau dari analisis rasio keserasian belanja pada belanja modal menunjukkan kurang berimbang pada tahun 2020 dengan presentase rasio sebesar 22,24% dan pada tahun 2021 dengan presentasi rasio sebesar 27,65% dengan rata- rata belanja modal sebesar 24,94%.

5. Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja

Tabel 12: Hasil Analisis Rasio Pertumbuhan

Keterangan	Tahun Anggaran	
	2020	2021
Belanja Daerah (thn t)	Rp2.070.537.134.542,82	Rp2.158.396.440.333,79
Belanja Daerah (thn t_1)	Rp2.064.913.509.053,00	Rp2.070.537.134.542,82
Rasio	0,27%	4,24%
Hasil	Positif	Positif

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel diatas menunjukkan kinerja keuangan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai

Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2020 dan 2021 ditinjau dari analisis rasio pertumbuhan belanja menunjukkan kenaikan belanja pada tahun 2020 dengan presentase rasio sebesar 0,27% dan pada tahun 2021 dengan presentasi rasio sebesar 4,24%.

Pembahasan

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020-2021 ditinjau dari Analisis Rasio Kemandirian

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada tahun anggaran 2020 hingga tahun anggaran 2021 ditinjau dari analisis rasio kemandirian menunjukkan kinerja keuangan sangat rendah dimana pada tahun anggaran 2020 menunjukkan hasil perhitungan sebesar 7,23% dan pada tahun anggaran 2021 menunjukkan hasil perhitungan sebesar 7,94%. Dari hasil perhitungan rasio kemandirian tersebut sudah dapat dikategorikan sangat rendah pada presentase rasio 0-25% dengan pola hubungan instruktif atau peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.

Hal ini disebabkan karena kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang bergantung pada pendapatan yang diperoleh dari anggaran pemerintah pusat atau pendapatan transfer pemerintah pusat yang berkontribusi dibandingkan PAD dalam membangun otonomi daerahnya.

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020-2021 ditinjau dari Analisis Rasio Efektivitas

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada tahun anggaran 2020 hingga tahun anggaran 2021 ditinjau dari analisis rasio efektivitas menunjukkan kinerja keuangan sangat efektif dimana pada tahun 2020 menunjukkan hasil perhitungan sebesar 110,72% dan pada tahun 2021 menunjukkan hasil perhitungan sebesar 124,94%. Dari hasil perhitungan rasio efektivitas tersebut sudah dapat dikategorikan sangat efektif pada presentase rasio >100%.

Hal ini disebabkan naiknya Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Kutai Barat karena mengelola PAD nya sangat baik, target anggaran tercapai serta pendapatan hasil kekayaan daerah yang diperoleh.

3. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020-2021 ditinjau dari Analisis Rasio Efisiensi

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada tahun anggaran 2020 hingga tahun anggaran 2021 ditinjau dari analisis rasio efisiensi menunjukkan kinerja keuangan yang efisien dimana pada tahun 2020 menunjukkan hasil perhitungan sebesar 70,13% dan pada tahun 2021 dengan hasil perhitungan sebesar 73,29%. Dari hasil perhitungan rasio efisiensi tersebut sudah dapat dikategorikan efisien pada presentase rasio 60%-80%.

Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengupayakan penghematan belanja daerah yang dilakukan serta mengefisiensikan belanja dengan cukup baik.

4. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020-2021 ditinjau dari Analisis Rasio Keserasain Belanja

a. Analisis Rasio Belanja Operasi

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada tahun anggaran 2020 hingga tahun anggaran 2021 ditinjau dari analisis rasio keserasain belanja pada belanja operasi menunjukkan

menunjukkan lebih mengalokasikan belanja operasi yang dilaksanakan dimana pada tahun 2020 menunjukkan cukup berimbang dengan hasil perhitungan sebesar 60,37% dan pada tahun 2021 hasil perhitungan sebesar 57,89% dengan rata-rata rasio belanja operasi sebesar 59,13%. Dari hasil perhitungan rasio keserasian belanja pada belanja operasi tersebut dikategorikan cukup berimbang pada presentase rasio 40%-60%.

Hal ini menunjukkan bahwa keserasian belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat lebih proporsi pada belanja operasi dalam memperoleh kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan pemeliharaan aset, dan pembelian yang dibutuhkan dalam kegiatan yang diadakan.

b. Analisis Rasio Keserasian Belanja Pada Belanja Modal

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada tahun anggaran 2020 hingga tahun anggaran 2021 ditinjau dari analisis rasio keserasian belanja pada belanja modal menunjukkan kurang mengalokasikan belanja modal yang dilaksanakan dimana pada tahun 2020 menunjukkan kurang berimbang dengan hasil dengan perhitungan sebesar 22,24% dan pada tahun 2021 hasil perhitungan sebesar 27,65% dengan rata-rata belanja modal sebesar 24,94%. Dari hasil perhitungan rasio keserasian belanja pada belanja operasi tersebut dikategorikan kurang berimbang pada presentase rasio 20%-40%.

Hal ini menunjukkan bahwa keserasian belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kurangnya pendapatan yang diperoleh dalam berinvestasi yang berbentuk modal jangka panjang.

5. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020-2021 ditinjau dari Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada tahun anggaran 2020 hingga tahun anggaran 2021 ditinjau dari analisis rasio pertumbuhan belanja mengalami kenaikan dimana pada tahun 2020 menunjukkan hasil perhitungan sebesar 0,27% dan pada tahun 2021 dengan hasil perhitungan sebesar 4,24%. Dari hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja tersebut sudah dapat dikategorikan positif.

Hal ini disebabkan naiknya anggaran belanja yang sudah ditentukan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat dalam melakukan pengendalian belanja, melakukan efisiensi belanja dan penghematan belanja.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020-2021 dikategorikan sangat rendah dengan menunjukkan pola hubungan instruktif atau peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Dikarenakan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang bergantung pada pendapatan yang diperoleh dari anggaran pemerintah pusat atau pendapatan transfer pemerintah pusat dibandingkan PAD dalam membangun otonomi daerahnya.
2. Rasio efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020-2021 dikategorikan sangat efektif. Dikarenakan naiknya Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Kutai Barat karena mengelola PAD nya sangat baik, target anggaran tercapai serta pendapatan hasil kekayaan daerah.

3. Rasio efisiensi belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020-2021 dikategorikan efisien. Dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memulai mengupayakan penghematan belanja daerah yang dilakukan serta mengefisiensikan belanja dengan cukup baik.
4. Rasio keserasian belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020-2021 berdasarkan analisis rasio keserasian belanja pada belanja operasi menunjukkan cukup berimbang. Dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat lebih proporsi pada belanja terhadap kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan pemeliharaan aset, dan pembelian yang dibutuhkan dalam kegiatan yang diadakan.
5. Rasio keserasian belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020-2021 berdasarkan analisis rasio keserasian belanja pada belanja modal menunjukkan kurang berimbang. Dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kurang memperoleh belanja pada modal untuk berinvestasi yang berbentuk modal jangka panjang.
6. Rasio pertumbuhan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020-2021 dikategorikan ukuran pertumbuhan positif. Dikarenakan naiknya anggaran belanja yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam melakukan pengendalian belanja, melakukan efisiensi belanja dan penghematan belanja.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan maka saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat merupakan penyelenggara keuangan daerah dan pelaksana kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat untuk menangani urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, menyelenggarakan koordinasi, melayani masyarakat, pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini penulis saran bahwa diharapkan kepada BKAD Kabupaten Kutai Barat Perlu memaksimalkan peningkatan penerimaan daerah dengan memperhatikan perkembangan PAD, dalam peningkatan penerimaan daerah perlu mengoptimalkan penggunaan pengelolaan sumber daya dan perlunya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah serta memperluas sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan PAD. Pada anggaran belanja perlu diperhatikan atas penggunaan anggaran belanja dengan baik di mana penggunaan belanja publik perlu di tingkatkan dan penggunaan belanja aparatur daerah perlu di turunkan serta melakukan pengendalian belanja dengan baik.
2. Bagi peniti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitain selanjutnya dengan menambahkan rasio keuangan dalam menganalisis keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2014. *Sistem Pengendalian Manjemen Sektor Publik*. Cetakan 1. Jakarta : Salemba Empat
- Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*, cetakan ke-7. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta : UUP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Edisi 2019. Yogyakarta : ANDI. Narafin, M. 2017. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ratmono dan Sholihin. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Rudianto. 2013. *Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta : Erlangga.